

POLICY ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF MINIMUM COMPETENCY ASSESSMENT AS AN EFFORT TO IMPROVE READING LITERACY OF STUDENTS IN SCHOOLS

Ma'mun Zahrudin¹, Shalahudin Ismail², Qiqi Yuliati Zakiah³

^{1,2,3}Pascasarjana Program Doktorat Pendidikan Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
mamunzahrudin@gmail.com¹, shalahudinismail75@gmail.com², qqzaqiah67@gmail.com³

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 21-01-2021
Direvisi : 07-02-2021
Disetujui : 09-02-2021
Online : 14-04-2021

Kata Kunci:

Analisis Kebijakan;
Literasi;
Peserta Didik.

Keywords:

Policy Analysis;
Literacy;
Students.



ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan implementasi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebagai upaya peningkatan literasi membaca peserta didik di sekolah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian kualitatif dengan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan informasi hasil Asesmen Kompetensi Minimum, guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Hasil Asesmen Kompetensi Minimum dapat memberi gambaran kepada guru mengenai takaran yang tepat untuk setiap "teaching at the right level". Strategi yang sesuai dengan kondisi murid, tugas atau pembelajaran yang diberikan juga sesuai dengan kondisi peserta didik. Dengan demikian antusiasme untuk belajar tetap terjaga. Rasa bosan karena tantangan atau tugas yang terlalu sederhana atau rasa putus asa karena tugas yang terlalu sulit, di luar jangkauan murid dapat dihindari.

Abstract: This study aims to analyze the implementation policies of the Minimum Competency Assessment (AKM) in improving the reading literacy efforts of students in schools. This type of research used in this research is a qualitative research model with a literature review. The results showed that using the information from the Minimum Competency Assessment results, teachers could develop effective and quality learning strategies. The results of the Minimum Competency Assessment can provide an overview to the teacher about the correct dose for each teaching at the right level. Strategies that are in accordance with the conditions of the students, assignments or learning given are also in accordance with the conditions of students. Thus the enthusiasm for learning is maintained. Boredom because of challenges or tasks that are too simple or feeling hopeless because of tasks that are too difficult, beyond the reach of students can be avoided.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh besar terhadap gaya hidup dan kebiasaan manusia, apalagi jika tidak adanya filter atau penyaring berbagai hal sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu akan berpengaruh terhadap kinerja setiap manusia termasuk di bidang pendidikan. Sumber daya manusia memiliki peran

besar dalam pelaksanaan pendidikan. Pendidikan yang merupakan suatu proses tidak dapat terlepas dari peran sumber daya manusia karena salah satu aspek penting itu adalah sumber daya manusia itu sendiri. Selain itu, manusia selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia terkadang menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif pegawai meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggih. Hal ini juga berlaku dalam dunia pendidikan, karena secara lebih khusus proses pembelajaran

yang diperankan oleh pendidik tidak dapat digantikan oleh teknologi. Untuk menjadikan sumber daya manusia itu lebih berfungsi baik secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukannya pengelolaan yang baik, yakni mulai dari perencanaan sampai pada tahap akhir dalam fungsi manajemen (Marlina, 2016).

Perubahan UU No. 2 Tahun 1989 menjadi UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang dilanjutkan adanya pemberlakuan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu, merupakan usaha dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Hal ini merupakan bagian dari solusi untuk menghadapi tantangan serta persaingan di era global dengan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidangnya yaitu cerdas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki akhlak mulia (*al-akhlaq al-karimah*) (Cahyo, 2016).

Terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan proses pembangunan pendidikan, negara diberi amanat sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut harus dijabarkan secara tepat ke dalam kurikulum, standar nasional pendidikan, program dan kebijakan pendidikan, proses pembelajaran, serta dalam sistem evaluasi. Permasalahannya sekarang adalah fungsi dan tujuan pendidikan nasional bukan saja tidak terjawab secara operasional dalam kegiatan pendidikan tapi juga seolah bersifat parsial terhadap program dan kebijakan pendidikan. Untuk mewujudkan amanat tersebut Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan visi pendidikan Indonesia tahun 2025 yang isinya “Terwujudnya Sistem Pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (Nur, 2013).

Namun, permasalahan pendidikan nasional yang muncul dan sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia

adalah rendahnya sumber daya manusia baik tenaga pendidik (guru) maupun tenaga non pendidik (tata usaha) pada setiap jenjang. Sementara berbagai usaha telah dilakukan dalam meningkatkan sumber daya manusia, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, perbaikan sarana prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah (Syukri 2019).

Survey Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) yang dilakukan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa kemampuan literasi siswa Indonesia masih menempati urutan bawah jika dibandingkan dengan negara lain. Tidak hanya sekedar itu, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh PISA (*Programme for International Student Assessment*) menunjukkan hal yang sama, yakni Indonesia hanya memiliki skor 371, serta menduduki negara dengan kemampuan membaca terendah ketiga (Sadli, 2019).

Pada era pemerintahan Joko Widodo saat ini, sektor pendidikan menjadi salah satu sasaran penting dan perhatian utama dalam program pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan adanya rencana perubahan dan pengembangan kebijakan baru bidang pendidikan. Kebijakan penting sebagaimana dipaparkan di atas tersebut adalah perubahan kebijakan penggantian Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter dengan tujuan meningkatkan kemampuan nalar dan penggunaan bahasa (literasi), kemampuan nalar dengan menggunakan matematika (numerisasi) serta penguatan pendidikan karakter.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim Menindak lanjuti arahan Presiden RI dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan yang dikenal dengan “Merdeka Belajar”, dimana program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) berbasis zonasi. Pada tanggal 10 Desember 2019, Mendikbud juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Dimana salah satu poin penting dari dua

kebijakan tersebut adalah bahwa Ujian Nasional (UN) tahun 2020 merupakan UN terakhir yang akan diselenggarakan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar dengan menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar dengan menggunakan matematika (*numerisasi*), dan penguatan pendidikan karakter (Kemendikbud, 2020b).

Perubahan tersebut dikembangkan dalam misi pendidikan Indonesia dalam rangka mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia cerdas komprehensif dan kompetitif. Perubahan tersebut dikembangkan dengan tujuan: (1) meningkatkan kemampuan bernalar dengan menggunakan bahasa (literasi), (2) meningkatkan kemampuan bernalar dengan menggunakan matematika (*numerisasi*), dan (3) meningkatkan penguatan pendidikan karakter.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai peningkatan mutu pembelajaran, antara lain: Penelitian yang dilakukan oleh Solikah (2014) bahwa strategi peningkatan mutu pembelajaran yang mampu meluluskan siswa yang berkualitas adalah melalui guru profesional. Penelitian yang dilakukan oleh Sadli (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implikasi pengembangan budaya literasi dapat meningkatkan kegemaran, ketertarikan, dan minat membaca pada siswa. Selanjutnya penelitian Fernando, (n.d.) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan UNBK diharapkan Supervisi Pendidikan Indonesia memiliki kualitas yang mumpuni.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai kebijakan implementasi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebagai upaya peningkatan literasi membaca peserta didik di sekolah.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan kajian literatur. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti;

kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka (Frimayanti, 2017).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kebijakan

Dipahami dalam arti terluasnya, analisis kebijakan dapat dilacak ke satu titik evolusi masyarakat di mana pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan secara sadar dibuat, sehingga dapat memungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif terhadap kaitan antara pengetahuan dan aksi. Waktu persis kapan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan pertama kali dihasilkan dapat diperdebatkan dan barangkali diketahui (Dunn 2003). Akan tetapi secara umum perkembangan prosedur untuk menganalisis kebijakan publik menurut Harold D. Laswell (1971) berhubungan dengan pertumbuhan peradaban yang relatif tiba-tiba dari suku-suku atau bangsa-bangsa yang memiliki kebebasan laut yang luas dan ekspansif serta diferensiasi peradaban kota dalam sejarah dunia. Dengan demikian analisis kebijakan sebagai kegiatan yang terspesialisasi menyertai perubahan-perubahan di dalam organisasi sosial yang diikuti dengan bentuk-bentuk baru teknologi produksi dan pola pemukiman menetap (Rusfiana, 2016).

Analisis kebijakan ialah proses atau kegiatan mensintesa informasi, termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan publik. Kebijakan publik ialah keputusan atau tindakan pemerintah yang berpengaruh atau mengarah pada tindakan individu dalam kelompok masyarakat (Simatupang, 2003). Menurut Duncan Mac Rae (1976), analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik.¹ Lebih lanjut Suryadi dan Tilaar menegaskan bahwa analisis kebijakan adalah sebagai suatu cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk pemecahan masalah kebijakan (Rokim, 2019). Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan

analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik (Fatkueroji, 2016).

Definisi analisis kebijakan menurut William N. Dunn (2004) ini, ada empat hal yang terkandung, 1) analisis kebijakan dimaknai sebagai ilmu sosial yang bisa diimplementasikan (terapkan), artinya suatu realitas berupa hasil nyata dari ilmu pengetahuan yang terlahir dari gerakan profesionalisme ilmu sosial, 2) analisis kebijakan menghasilkan dan mendayagunakan informasi artinya mengumpulkan, mengolah dan mendayagunakan data menjadi masukan bagi para pengambil keputusan, 3) analisis kebijakan menggunakan metode inquiri dan argumentasi berganda, dimana penggunaan jenis, metode, dan teknik analisis kebijakan seperti metode deskriptif, preskriptif, kuantitatif dan kualitatif atau *mix method*. Penggunaan metode ini tergantung pada sifat dan isu kebijakan yang disoroti, 4) analisis kebijakan sebagai proses pengambilan keputusan bersifat politis sebagai suatu upaya pendayagunaan dan pemaksimalan peran informasi dalam konteks proses penetapan kebijakan (Arwildayanto, 2018).

Dari definisi di atas kiranya dapat dirumuskan karakteristik dasar analisis kebijakan. *Pertama*, analisis kebijakan merupakan suatu proses atau kegiatan "sintesa" informasi yang berarti pemaduan berbagai informasi, termasuk hasil penelitian, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang selaras. Hal ini berarti obyek analisis kebijakan ialah proses penyusunan dan paket kebijakan. Kegiatan utama analisis kebijakan ialah pengumpulan informasi secara sistematis dan penarikan kesimpulan logis dari informasi tersebut. Dengan demikian, analisis kebijakan berdasarkan pada kaidah ilmiah. *Kedua*, salah satu sumber utama informasi yang menjadi bahan analisis kebijakan ialah hasil-hasil penelitian. Hal ini berarti bahwa analisis kebijakan merupakan proses pengolahan lebih lanjut dari hasil-hasil penelitian sehingga siap digunakan dalam pengambilan keputusan dan desain kebijakan publik. Oleh karena itu, analisis kebijakan merupakan salah satu bentuk diseminasi hasil-hasil penelitian. *Ketiga*, output analisis kebijakan ialah rekomendasi opsi keputusan atau desain kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa *out put* kebijakan adalah berupa nasehat atau petunjuk operasional tentang bahan pengambilan keputusan publik bagi spesifik klien. Oleh karena itu, analisis kebijakan haruslah disajikan

secara jelas, singkat, padat, lengkap dan seksama. *Keempat*, klien analisis kebijakan ialah para pengambil keputusan kebijakan publik (pemerintah dan DPR) dan kelompok yang berkepentingan (*interest groups*) atas kebijakan pemerintah tersebut. Klien pengguna analisis kebijakan bersifat spesifik. Hal ini berkaitan langsung dengan output analisis kebijakan yang berupa nasehat tentang kebijakan publik. *Kelima*, analisis kebijakan berorientasi klien (*client oriented*). Hal ini merupakan implikasi dari sifat analisis kebijakan yang menghasilkan nasehat keputusan siap-guna bagi klien spesifik. Tanpa berorientasi klien analisis kebijakan tak akan mungkin siap guna. Hal ini berarti analisis kebijakan haruslah didasarkan pada "dari, oleh dan untuk klien". Analisis kebijakan hanya dilakukan apabila ada permintaan atau "patut diduga" benar-benar dibutuhkan kliennya. Analisis kebijakan didorong oleh kebutuhan mendesak kliennya (*client's need push*) (Simatupang, 2003).

Dari beberapa pendapat tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan adalah cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk memecahkan masalah kebijakan. Pada hakikatnya analisis kebijakan melibatkan hasil pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan.

Tujuan analisis kebijakan adalah apa yang diusahakan oleh seorang pengambil kebijakan untuk mencapai atau memperolehnya dengan menggunakan kebijakan-kebijakannya. Tugas yang sering kali paling sulit bagi analis adalah menyingkap apakah memang benar atau tidak tujuan tersebut. Kadang diutarakan secara jelas namun sering kali tidak langsung oleh pembuat kebijakan. Maka tugas analis adalah untuk menyelidiki dan mendapatkan persetujuan mengenai tujuan yang sebenarnya (Asmad, 2012).

Peran analisis kebijakan sangat penting karena bisa membantu seorang pembuat keputusan dengan memberikan informasi yang diperoleh melalui penelitian dan analisis, memisahkan dan mengklarifikasi persoalan mengungkap ketidakcocokan tujuan dan upayanya, memberikan alternatif-alternatif baru dan mengusulkan cara-cara menerjemahkan ide-ide kedalam kebijakan-kebijakan yang mudah diwujudkan dan direalisasikan. Kontribusi utamanya barangkali untuk memberikan masukan-masukan terutama

dengan memperhitungkan keutamaan dan kepekaan parameter-nya. Analisis ini tidak lebih dari tambahan, meskipun merupakan hal yang penting dalam rangka penilaian, intuisi dan pengalaman si pembuat keputusan.

Badjuri dan Yuwono (2002) mengemukakan lima argumen tentang arti penting analisis kebijakan publik, yakni:

1. Dengan analisis kebijakan maka pertimbangan yang ilmiah, rasional dan obyektif diharapkan dijadikan dasar bagi semua pembuatan kebijakan publik. Ini artinya bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan pertimbangan ilmiah yang rasional dan obyektif.
2. Analisis kebijakan publik yang baik dan komprehensif memungkinkan sebuah kebijakan didesain secara sempurna dalam rangka merealisasikan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum (*public welfare*).
3. Analisis kebijakan menjadi sangat penting oleh karena persoalan bersifat multidimensional, saling terkait (*interdependent*) dan berkorelasi satu dengan lainnya.
4. Analisis kebijakan memungkinkan tersedianya panduan yang komprehensif bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Hal ini disebabkan analisis kebijakan juga mencakup dua hal pokok yaitu hal-hal yang bersifat substansial saat ini dan hal-hal strategis yang mungkin akan terjadi ada masa yang akan datang.
5. Analisis kebijakan memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi publik. Hal ini dikarenakan dalam metode analisis kebijakan mesti melibatkan aspirasi masyarakat (Asmad, 2012).

Dalam menganalisis suatu kebijakan, maka perlu dilakukan pendekatan- pendekatan antara lain:

1. Pendekatan empirik/analistik yaitu menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu kebijakan, memusatkan perhatian pada masalah pokok, menjelaskan sebab akibat dari kebijakan publik.
2. Pendekatan evaluatif, yaitu menilai manfaat dari suatu kebijakan, berkaitan dengan penentuan harga atau nilai dari beberapa

kebijakan, dimana jenis informasi yang dihasilkan bersifat evaluatif.

3. Pendekatan normatif, yaitu tindakan apa yang semestinya dilakukan untuk perumusan kebijakan mendatang. Pengusulan arah tindakan yang dapat memecahkan suatu masalah kebijakan (Rahman, 2015).

Dengan demikian analisis kebijakan sangat penting karena bisa membantu seorang pembuat keputusan dengan memberikan informasi yang diperoleh melalui penelitian dan analisis, memisahkan dan mengklarifikasi persoalan mengungkap ketidakcocokan tujuan dan upayanya, memberikan alternatif-alternatif baru dan mengusulkan cara-cara menerjemahkan ide-ide ke dalam kebijakan-kebijakan yang mudah diwujudkan dan direalisasikan. Kontribusi utamanya barangkali untuk memberikan masukan-masukan terutama dengan memperhitungkan keutamaan dan kepekaan parameter-nya. Analisis ini tidak lebih dari tambahan, meskipun merupakan hal yang penting dalam rangka penilaian, intuisi dan pengalaman si pembuat keputusan.

2. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika (numerasi). Baik pada literasi membaca maupun numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis-sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten (Mendikbud, 2020).

3. Literasi Membaca

Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu

sebagai warga Indonesia dan warga dunia serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat (Mendikbud, 2020).

Secara umum, literasi diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Istilah "literasi" memiliki makna meluas dari waktu ke waktu. Literasi saat ini tidak hanya diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis tetapi memiliki makna dan implikasi dari keterampilan membaca dan menulis dasar ke pemerolehan dan manipulasi pengetahuan melalui teks tertulis, dari analisis metalinguistik unit gramatikal ke struktur teks lisan dan tertulis, dan dampak sejarah manusia ke konsekuensi filosofis dan sosial pendidikan barat. Literasi mencakup berbagai jenis keterampilan seperti membaca, menulis, memproses informasi, ide dan pendapat, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Literasi juga melibatkan lebih banyak tindakan dan terhubung dengan pembentukan sikap, nilai, perasaan, hubungan, struktur kekuasaan, dan aspek kontekstual (Indriyani et al., 2019).

Seorang literat adalah orang yang sudah mampu memahami sesuatu disebabkan oleh orang tersebut membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut. Kepekaan atau literasi pada seseorang tentu tidak muncul begitu saja. Tidak ada manusia yang sudah literat sejak lahir. Menciptakan generasi literat membutuhkan proses panjang dan sarana yang kondusif. Proses ini dimulai dari kecil dan dari lingkungan keluarga, lalu didukung atau dikembangkan di sekolah, lingkungan pergaulan, dan lingkungan pekerjaan. Budaya literasi juga sangat terkait dengan pola pembelajaran di sekolah dan ketersediaan bahan bacaan di perpustakaan. Tapi kita juga menyadari bahwa literasi tidak harus diperoleh dari bangku sekolah atau pendidikan yang tinggi. Berbagai macam literasi tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Warsihna, 2016).

Gerakan literasi membaca dan menulis harus ditanamkan oleh pemerintah agar menjadi bagian budaya masyarakatnya. Gerakan masyarakat membaca dan menulis merupakan gerakan yang menjadi satu kesatuan. Meniadakan yang satu akan terjadi kepincangan. Misalnya hanya literasi membaca saja, lalu apa yang dibaca. Begitu juga hanya literasi menulis, lalu siapa yang membaca.

Dengan demikian kedua literasi ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang tidak dapat dibuang salah satu. Gerakan literasi membaca dan menulis ini harus dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan dengan media apa saja. Dengan literasi membaca dan menulis akan mendorong masyarakatnya selalu mengikuti perkembangan informasi. Dengan informasi tersebut masyarakat akan dapat mengikuti perkembangan zaman, semakin kreatif dan mandiri dalam menangani masalah dalam kehidupannya (Warsihna, 2016).

Kajian utama dalam literasi membaca tertuju pada empat hal, yaitu: (1) keterampilan membaca; (2) penerapan, pelatihan, dan penetapan bacaan; (3) proses membaca; dan (4) teks yang digunakan dalam membaca. Salah satu jenis membaca dalam literasi membaca adalah membaca pemahaman. Memandang literasi membaca dari segi keterampilan membaca pemahaman bermuara pada teknik membaca pemahaman yang digunakan. Teknik membaca pemahaman yang benar, yaitu: membaca dengan tidak bersuara, bibir tidak komat-kamit, tidak menggerakkan kepala mengikuti baris bacaan, dan tidak menunjuk baris bacaan. Memperhatikan teknik membaca lancar akan melahirkan kualitas membaca peserta didik yang lebih baik (Suarni et al., 2019).

Menyadari pentingnya literasi bagi masyarakat, Pemerintah sudah menerapkan gerakan literasi dalam proses pembelajaran di sekolah. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dikembangkan berdasarkan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Gerakan literasi sekolah bertujuan membiasakan siswa untuk membaca dan menulis guna menumbuhkan budi pekerti. Dalam jangka panjang, diharapkan dapat menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan literasi tinggi. Yaitu mampu mengakses, memahami, dan menggunakan informasi dengan cerdas (Lubis n.d.). Namun, hasilnya belum menggembirakan. Sampai saat ini, kondisi literasi membaca dan menulis masyarakat Indonesia masih sangat minim. Padahal pada abad-21 ini ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan TIK. Pemanfaatan TIK terjadi pada seluruh aspek kehidupan manusia, tak terkecuali untuk pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia.

Keempat kajian utama dalam literasi membaca tersebut dapat dibelajarkan dengan adanya persiapan yang harus dilakukan. Salah satu persiapan dapat ditemukan pada bahan ajar yang digunakan. Peran serta bahan ajar merupakan hal pokok yang tidak bisa terlepas dari proses pembelajaran yang dilaksanakan. Oleh sebab itu, kesiapan bahan ajar merupakan faktor penentu berhasil-tidaknya proses pembelajaran literasi membaca yang diberikan. Bahan ajar literasi membaca mengacu pada ketersediaan teks bacaan. Bahan ajar yang dikembangkan dengan tepat akan menumbuhkan usaha kreatif penemuan sendiri isi bacaan oleh peserta didik. Proses penemuan yang dilakukan akan memberikan pengalaman belajar yang berarti bagi peserta didik dalam implementasi literasi membaca. Pengalaman akan terlihat ketika peserta didik mampu memahami isi bacaan, menyerap informasi, dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh. Oleh sebab itu, kesiapan bahan ajar merupakan faktor penentu berhasil tidaknya implementasi literasi membaca.

Literasi membaca secara umum tidak saja berdampak bagi siswa, tetapi juga terhadap masyarakat serta bangsa dan negara. Kemampuan literasi memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan bagi individu atau masyarakat. Dengan memiliki populasi yang dapat mengaplikasikan pemahaman matematika di dalam konteks ekonomi, teknik, sains, sosial, dan bidang lainnya, daya saing ketenagakerjaan dan kesejahteraan ekonomi akan meningkat.

4. Implementasi Asesmen Kompetensi Minimum di Sekolah

Dalam pembelajaran terdapat tiga komponen penting, yaitu kurikulum (apa yang diharapkan akan dicapai), pembelajaran (bagaimana mencapai) dan asesmen (apa yang sudah dicapai). Asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Asesmen Kompetensi Minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar-mengajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid.

Pelaporan hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Tingkat

kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian murid. Dengan demikian "Teaching at the right level" dapat diterapkan. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian murid akan memudahkan murid menguasai konten atau kompetensi yang diharapkan pada suatu mata pelajaran.

Untuk memastikan AKM mengukur kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan, juga sesuai dengan pengertian Literasi Membaca dan Numerasi yang telah disampaikan terdahulu, soal AKM diharapkan tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu tetapi berbagai konten, berbagai konteks dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada Literasi Membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan, dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok yaitu teks informasi dan teks fiksi. Pada Numerasi konten dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu Bilangan, Pengukuran dan Geometri, Data dan Ketidakpastian, serta Aljabar. Tingkat kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Proses kognitif pada Literasi Membaca dan Numerasi dibedakan menjadi tiga level. Pada Literasi Membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Pada Numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi tiga, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik (Mendikbud, 2020).

Hasil AKM dilaporkan dalam empat kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah: 1) Perlu Intervensi Khusus, 2) Dasar, 3) Cakap, 4) Mahir. Pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas.

Guru diharapkan menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi murid. Berikut contoh strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan empat tingkat kompetensi literasi membaca murid:

- a. Murid di tingkat **Perlu Intervensi Khusus** belum mampu memahami isi bacaan, murid

hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut. Murid perlu diberi bahan belajar lain secara audio, visual dan pendampingan khusus.

- b. Murid di tingkat **Dasar** telah mampu mengambil informasi dari teks, namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi. Murid dapat diberi sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang utuh.
- c. Murid di tingkat **Cakap** mampu memahami dengan baik isi teks mengenai koperasi, namun belum mampu merefleksi. Murid dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan murid, mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi.
- d. Murid di tingkat **Mahir** mampu memahami isi bacaan dan merefleksi kegunaan koperasi dari teks yang diberikan oleh guru. Guru dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan koperasi (Mendikbud, 2020).

Empat tingkatan kompetensi dengan tindak lanjut yang perlu diberikan:

- a. Murid di tingkat **Perlu Intervensi Khusus** memiliki penguasaan konsep matematika yang sangat minimal. Murid ini perlu didampingi mulai dari pencatatan data serta dilakukan diskusi untuk memvalidasi hasil pencatatan data. Diskusi dapat dilakukan dengan teman yang kompetensi numerasinya cakap ataupun mahir.
- b. Murid di tingkat **Dasar** sudah menguasai konsep dasar, namun masih kesulitan untuk menerapkan dalam situasi yang relevan. Murid perlu diberi contoh cara menyajikan data atau menuangkan data hasil catatannya ke dalam bentuk penyajian yang tepat dan akurat. Interpretasi holistik mengenai data sebelum menarik kesimpulan dilakukan dalam diskusi bersama.
- c. Murid di tingkat **Cakap** sudah memahami konsep dan mampu menerapkan konsepnya, namun perlu diasah kemampuan bernalarnya untuk mengetahui adanya kesalahan pada data atau anomali data. Murid dapat ditugaskan untuk membandingkan datanya dengan data kelompok lainnya kemudian membuat simpulan umum hasil penelitian dalam satu kelas. Murid

dibimbing dalam menjustifikasi data yang sifatnya anomali.

- d. Murid di tingkat **Mahir** mampu menerapkan konsep matematika yang dimiliki dalam beragam konteks serta bernalar untuk menyelesaikan masalah. Murid ini dapat ditugaskan untuk membandingkan data dirinya, data kelompok lainnya dan data dari sumber lainnya (misal, jurnal ilmiah yang relevan) kemudian membuat generalisasi hasil percobaan yang dilakukan dengan menganalisis beragam data (Mendikbud, 2020).

Begitu pentingnya pendidikan bagi manusia, maka diperlukan adanya pendidikan yang berkualitas. Yakni pendidikan yang dapat melahirkan sumber daya manusia yang dapat memaksimalkan potensi diri siswa. Sebab salah satu kemajuan suatu bangsa adalah dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu memaksimalkan potensinya. Jika melihatnya secara konstruksi hukum, UU Sisdiknas secara eksplisit memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi mutu sistem pendidikan nasional. Asesmen pengganti UN akan menjadi instrumen untuk melayani fungsi tersebut. Selain itu, pengadilan negeri Jakarta pada tahun 2007, dan kemudian Mahkamah Agung pada tahun 2009, menilai bahwa UN tidak adil bagi siswa yang berada di sekolah atau daerah yang kekurangan sumber daya (Kemendikbud, 2020). Mahkamah Agung memerintahkan untuk meninjau ulang sistem pendidikan nasional dengan merancang asesmen baru yang berfungsi untuk pemetaan mutu serta umpan balik bagi sekolah, tanpa ada konsekuensi pada siswa. Pemerintah secara otomatis telah mematuhi putusan Mahkamah Agung mengenai UN.

Dengan penghapusan UN yang sudah ditetapkan oleh MA tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum sebagai pengganti UN sebagai upaya peningkatan literasi membaca siswa.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan di atas, pemanfaatan informasi hasil Asesmen Kompetensi Minimum, guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Hasil Asesmen Kompetensi Minimum dapat memberi gambaran kepada guru mengenai takaran yang tepat untuk setiap *“teaching at the right level”*. Strategi, tugas, atau pembelajaran

disesuaikan dengan kondisi murid. Dengan demikian antusiasme untuk belajar tetap terjaga. Rasa bosan karena tantangan atau tugas yang terlalu sederhana atau rasa putus asa karena tugas yang terlalu sulit, di luar jangkauan murid dapat dihindari. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Arwildayanto. (2018). *Analisis kebijakan Pendidikan (Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif)*. Cendekia Press.
- Asmad. (2012). *Konsep Dasar Analisis Kebijakan*.
- Cahyo, A. N. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan Dalam Meningkatkan Daya Saing Sdit Ar Rahmah, Pacitan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1(2), 263–286.
- Fatkuroji. (2016). Implementasi Kebijakan Pembelajaran Terpadu dan Minat Pelanggan Pendidikan. *Jurnal Tarbawi*, 2(02), 28–40.
- Fernando, T. J. (n.d.). *Pengaruh UNBK terhadap Mutu Pendidikan Indonesia*.
- Frimayanti, A. I. (2017). Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(Ii), 227–247.
- Indriyani, V., Zaim, M., Atmazaki, A., & Ramadhan, S. (2019). Literasi Baca Tulis Dan Inovasi Kurikulum Bahasa. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 5(1), 108. <https://doi.org/10.22219/kembara.vol5.no1.108-118>
- Kemendikbud. (2020a). *Dampak Asesmen Kompetensi Minimum Bagi Guru dan Siswa*. <https://Lpmp.lampung.kemdikbud.go.id/Detailpost/Apakah-Dampak-Asesmen-Kompetensi-Minimum-Bagi-Guru>.
- Kemendikbud. (2020b). *Pengganti UN: Asesmen Kompetensi Minimum*. <https://Www.Fathur.Web.Id/2020/02/Pengganti-Un-Asesmen-Kompetensi-Minimal.Html=1>.
- Makmur Syukri. (2019). Modernisasi Pendidikan Islam Indonesia Kajian Analisis Kritis Pengembangan SDM Madrasah. *HIJRI - Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Keislaman*, 8(1), 1–24.
- Marlina, L. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia (Sdm) Dalam Pendidikan. *Istinbath*, 15(1), 123–139.
- Mendikbud. (2020). *AKM dan Implikasinya Pada Pembelajaran*. Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan.
- Nur, M. (2013). Implementasi Kebijakan Pelaksanaan dan Analisis Hasil Ujian Nasional di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. *E-Jurnal Katalogis*, 1(2), 153–161.
- Rahman, W. Y. (2015). Analisis Kebijakan Pendidikan Keluarga dalam Memantapkan Perilaku Moral Anak di Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 3(2), 104–114.
- Rokim. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya dalam Pendidikan Islam. *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 60–69.
- Rusfiana, A. Y. A. dan Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Sadli, M. (2019). Analisis Pengembangan Budaya Literasi dalam Meningkatkan Minat membaca Siswa di Sekolah Dasar. *TERAMPIL Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 151–164.
- Silvia Sandi Wisuda Lubis. (n.d.). *Membangun Budaya literasi Membaca Dengan Pemanfaatan Media Jurnal Baca Harian*. 127–135.
- Simatupang, P. (2003). Analisis Kebijakan : Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 6(3), 1–23.
- Solikhah, A. (2014). Strategi Peningkatan Mutu Pembelajaran Pada Sekolah Unggulan. *Didaktika Religia*, 2(1), 175–212.
- Suarni, N., Taufina, T., & Zikri, A. (2019). Literasi Membaca Meningkatkan Karakter Positif Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 3(4), 1014–1021. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v3i4.215>
- Warsihna, J. (2016). Meningkatkan Literasi Membaca Dan Menulis Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik). *Jurnal Kwangsan*, 4(2), 67. <https://doi.org/10.31800/jurnalkwangsan.v4i2.84>
- William N. Dunn. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.